

Daftar Pustaka

1. BUKU

Alfitri, Diktat Mata Kuliah Pembangunan Partisipatif, Dana HEDS, Padang, 2006

Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Amirudin dan Zainal Asikin, Pngantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

A.Sonni Keraf, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, yogyakarta, 2010

Bernadinus Steny, Free and Prior Informed Consent Dalam Pergulatan Hukum Lokal, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005

Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free Prior Informed Consent (FPIC) Bagi masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak Aktifitas REDD+ di Indonesia, Jakarta, 2011

Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Golar dkk, Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consesnt (FPIC) Program UN-REDD+ Di Sulawesi tengah, Sulawesi tengah, 2012

Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1995

Hyronimus Rhiti, Kompleksitas Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya, yogyakarta, 2005

Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 2010

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDAPAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Penjelasan International covenant on Economic and Culture Right

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

3. LAIN-LAIN

Harian Umum Republika, PLN Bangun 9.550 MW Pembangkit, 10 Oktober

1994

